

Judul : Jangan Ada Penumpang Gelap
Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Jangan Ada Penumpang Gelap

Empat RUU Omnibus Law Dikebut

JAKARTA-Ada empat Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang bakal disebut pembahasannya oleh DPR RI. Keempatnya adalah RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, penentuan RUU tersebut telah dilakukan dalam rapat bersama Menkumham Yasonna H Laoly pada 16 Januari 2020. Seluruh RUU, telah disepakati oleh seluruh komisi di DPR untuk masuk Prolegnas Prioritas 2020.

"Hasil penentuan kembali prolegnas oleh legislasi juga telah disampaikan kepada seluruh pimpinan komisi I-XI dalam rapat terbatas pimpinan anggaran legislasi dengan pimpinan komisi pada hari Selasa tanggal 21 Januari," kata Supratman saat memberikan laporan pembahasan dari Baleg dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1).

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin sesi pengesahan dalam rapat paripurna bertanya kepada seluruh anggota dewan usai mendengarkan beberapa interupsi yang dilontarkan anggota dewan lain dalam rapat.

"Baik lah, para peserta rapat paripurna, setelah kita mendengar ketua Baleg menyampaikan hasil rapat Baleg, apakah 50 RUU prolegnas prioritas dapat disetujui?" tanya Muhaimin.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir.

Sementara, anggota Fraksi PAN DPR RI Zainuddin Maliki mengin-



HUJAN INTERUPSI - Suasana rapat paripurna keenam masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Rapat paripurna tersebut menyepakati 50 RUU masuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

gatkan, agar DPR mulai mewaspadai adanya penumpang gelap yang memanfaatkan keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk kepentingan pribadi.

"Kami mengingatkan untuk mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap omnibus law (Cipta Lapangan Kerja, red). Dalam hal ini adalah para pemburu rente atau pelaku pasar yang bermodal aset, yang dipikir hanyalah keuntungan," kata Zainuddin kepada INDOPOS di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1).

Zainuddin mengingatkan agar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak melemahkan per-

ekonomian rakyat kecil. "Maka sekali lagi, saya dari PAN mengajak tentu di mulai dari wilayah sendiri, mengajak anggota DPR, mengajak pemerintah dan kita bersama, untuk bisa mencegah campur tangan para pemburu rente," ujar Zainuddin.

"Kita ingin menghasilkan Omnibus Law yang memajukan kesejahteraan umum dan tidak menyengsarakan rakyat," lanjut dia. Diketahui, kemarin DPR menggelar Rapat Paripurna ke-VIII Masa Persidangan II tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan. Berdasarkan jadwal, rapat paripurna seharusnya dimulai pada

pukul 13.00. Namun, bel pertanda rapat akan dimulai berdering sekitar pukul 13.38.

Pimpinan rapat paripurna adalah Ketua DPR RI Puan Maharani. Rapat juga dihadiri pimpinan DPR lain, yaitu Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Aziz Syamsudin dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Namun, Sufmi Dasco Ahmad tak terlihat.

Puan pun membacakan jumlah anggota dewan yang hadir pada rapat, yaitu sebanyak 327 dari total 575 orang anggota. Artinya, sekitar 24,8 wakil rakyat di Senayan tak hadir dalam rapat paripurna. "Berdasarkan absensi yang ditan-

datangani anggota, 327 dari total 575 anggota hadir dan dihadiri seluruh fraksi maka kuorum tercapai," ujar Puan.

Puan mengatakan, jumlah anggota DPR yang hadir sudah memenuhi syarat untuk membuka rapat paripurna. Lalu, ia mengetuk palu, tanda dibukanya rapat paripurna.

Rapat tersebut mengagendakan pengesahan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Kemudian, pengesahan sekaligus pengambilan sumpah anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW). (aen)